

DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2001 – 2006

MADE SUYANA UTAMA

*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
Email: suyanautama@gmail.com*

ABSTRACT

Since 2001, all regions in Bali Province have implemented fiscal decentralization or in other word autonomy. Competency of local government in order to implement each function as the consequence of autonomy depends on its regional financial ability. The lack of capacity and the ability to manage the performance of regional finance will emerge negative effect cycle, which is the low standard of public services or even inability to increase people's prosperity. Different implementation of local autonomy among regions depends on the economic potential and human resources owned by each region and this also will affect the social welfare.

This research is aimed to figure out the impact of region financial performance discrepancy as a proxy of fiscal decentralization toward the social welfare of regions in Bali province within 2001-2006. The analysis tool used is the combination of descriptive statistic, trend analysis and regression.

Trend analysis shows that both variables tend to decrease within 2001-2006. One way regression shows that discrepancy of region's financial performance positively affects the discrepancy social welfare in regions in Bali Province within 2001-2006. As the conclusion, less discrepancy in financial performance results in less discrepancy in social welfare in regions of Bali Province within the years 2001 -2006.

Key words: fiscal decentralization, financial performance, discrepancy in social welfare.

ABSTRAK

Sejak tahun 2001 semua kabupaten/kota di Provinsi Bali melaksanakan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah. Keberhasilan Pemerintah daerah dalam pembangunan sangat tergantung dari kemampuan keuangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi tersebut. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah memiliki siklus efek negatif, yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat pelayanan pada masyarakat atau ketidakmampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaan potensi ekonomi dan sumberdaya manusia yang dimiliki masing-masing daerah dapat mengakibatkan perbedaan pelaksanaan otonomi daerah yang selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan kinerja keuangan daerah sebagai proksi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan kesejahteraan di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 hingga 2006. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis faktor, analisis *trend*, dan analisis regresi.

Hasil analisis *trend* mengindikasikan bahwa ketimpangan kinerja keuangan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal selama tahun 2001 sampai 2006 cenderung menurun atau berkurang. Hasil regresi sederhana mengindikasikan bahwa ketimpangan kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 sampai 2006. Hal ini berarti bahwa semakin kecil ketimpangan kinerja keuangan daerah, semakin kecil ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 hingga 2006.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, ketimpangan kinerja keuangan daerah, ketimpangan kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Saat ini banyak negara telah merubah tata pemerintahannya dari sentralistik menuju desentralisasi, baik pada negara-negara maju maupun juga pada negara-negara berkembang. Secara umum desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang ada dibawahnya. Oros

(2003) menyebutkan ada beberapa tipe desentralisasi secara teoritis, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dilakukan sebagai salah satu cara melepaskan diri dari berbagai ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi, bahkan untuk kepentingan

menghindari perpecahan wilayah (Khusaini, 2006). Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Sebab dengan makin dekat pemerintah dengan masyarakat, desentralisasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan bertanggung-jawab atau *accountable* (Suwandi, 2000). Diyakini bahwa masyarakat lokal melalui kabupaten/kota memiliki pengetahuan yang lebih tentang kebutuhan, kondisi dan yang diprioritaskan. Mobilisasi sumberdaya lebih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan pengambil keputusan di tingkat lokal (Simanjuntak, 2000). Dengan desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan lebih mudah memobilisasi penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan *public service* (Peterson, 1996). Yustika (2007) juga mengatakan bahwa dengan otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang paling mungkin bagi setiap daerah mendinamisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah.

Para pakar politik dan ekonomi seperti Bahl dan Linn, Oates, Bird, Gramlich, Bird dan Wallich, dan Martinez dan McNab (Khusaini, 2006), serta para ahli dari World Bank (1997) mengatakan bahwa dengan diserahkan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat seperti yang dilakukan Lindahman dan Thurmaier (2002) menyimpulkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Meskipun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga mengakibatkan dampak negatif. Huther dan Shah (1998) mengamati bahwa desentralisasi fiskal memperlebar antara daerah yang kaya dan yang miskin, *miss-management macroeconomy*, dan meningkatnya korupsi. Lindahman dan Thurmaier (2002), juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi, ketimpangan antar daerah dan sebagainya.

Sebagai bagian dari Republik Indonesia, semua kabupaten/kota di provinsi secara bersamaan juga

melaksanakan otonomi daerah sejak tahun 2001. Kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*) tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat sehingga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena potensi alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya manusia masing-masing kabupaten/kota di provinsi relatif beragam, maka hal ini dapat menyebabkan tingkat pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi beragam, yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai ketimpangan kinerja keuangan daerah yang merupakan proksi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dikaitkan dengan ketimpangan kinerja pembangunan.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumbernya

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Teknik Analisis

Ukuran kinerja keuangan daerah merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari analisis faktor dengan menggunakan variable indikator rasio keserasian, rasio kemandirian, dan upaya pemungutan PAD. Pengukuran kinerja keuangan ini mengaplikasikan konsep yang dikemukakan Halim (2002). Di pihak lain, ukuran kesejahteraan masyarakat merupakan indeks komposit dari variabel pendapatan per kapita, pendidikan masyarakat, dan usia harapan hidup dengan mengadopsi konsep Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index = HDI* (Todaro, 2000).

Analisis faktor digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan indeks komposit dan sekaligus mengukur validitas dari model pengukuran (*construct*) kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan beberapa indikator. Validitas model pengukuran memperhatikan kriteria yang dikemukakan Hair (1998), yaitu dengan melihat korelasi KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett's test minimal 0,50, *anti image* atau *measures of sampling adequacy* (MSA) minimal 0,50, *eigen value* lebih besar dari satu ($\lambda \geq 1$), dan varians kumulatifnya minimal 60 persen untuk penelitian ilmu-ilmu sosial, serta faktor muatan (*loading factor*) minimal 0,60 untuk pengamatan

yang kurang dari 100.

Berdasarkan data tahunan indeks kinerja keuangan daerah dan indeks kesejahteraan masyarakat tiap-tiap kabupaten/kota tersebut kemudian dihitung koefisien variasinya untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota, dengan rumus (Nata Wirawan, 2001):

$$KV = \frac{Std\ Deviasi}{Rata-rata} \times 100$$

Variabel-variabel penelitian pada per tahun untuk seluruh kabupaten/kota dihitung rata-ratanya, selanjutnya dianalisis kecenderungannya (*trend*) dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dengan menerapkan model regresi sederhana dengan waktu sebagai variabel bebas, dengan rumus (Suyana Utama, 2008):

$$Y_t = a + bX_t + e_t$$

Keterangan:

Y = ketimpangan kinerja keuangan/kesejahteraan masyarakat

X = tahun

a = konstanta

b = koefisien regresi (*trend*)

e = kesalahan pengganggu

t = tahun pengamatan (2001-2006)

Hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat dianalisis dengan menggunakan model regresi sederhana dengan rumus (Suyana Utama, 2008):

$$Y_t = a + bX_t + e_t$$

Keterangan:

Y = ketimpangan kesejahteraan masyarakat

X = ketimpangan kinerja keuangan daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = kesalahan pengganggu

t = tahun pengamatan (2001-2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Kinerja Keuangan Daerah

Seperti yang diutarakan sebelumnya, ketimpangan kinerja keuangan daerah dihitung dengan menggunakan koefisien variasi, yaitu standar deviasi kinerja keuangan daerah dibagi dengan rata-ratanya dikalikan dengan 100 persen. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan indikator: (a) rasio kemandirian, (b) rasio keserasian, dan (c) upaya pemungutan PAD, yang dihas sebagai berikut.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Analisis kemandirian keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2001 - 2006 bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa memperlihatkan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/

kota dalam melaksanakan kinerja keuangannya sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh rasio besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pengeluaran belanja daerah (TBD) atau yang disebut derajat desentralisasi fiskal (DDF), dengan formulasi (Halim, 2002) sebagai berikut.

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja Daerah (TBD)}} \times 100\%$$

Sesuai dengan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka anggaran pendapatan penerimaan kabupaten/kota tahun anggaran 2001 - 2006 dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 apabila dihitung rata-ratanya, rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 - 2006 adalah 16,68. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nataluddin (Halim, 2002) dapat dikategorikan pola hubungan instruktif, karena memiliki rasio kemandirian yang kurang dari 25 persen. Namun tidak semua daerah memiliki pola hubungan yang sama. Kabupaten Badung misalnya, memiliki pola hubungan yang partisipatif karena memiliki rasio kemandirian rata-rata 60,68 persen, sedangkan Kota Denpasar memiliki pola hubungan yang konsultatif, karena memiliki rasio kemandirian pada rentangan antara 25 - 50 persen.

Tabel 1. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi Bali, Tahun Anggaran 2001 - 2006 (%)

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata
Buleleng	6,18	6,49	4,90	4,90	6,48	5,03	5,66
Jembrana	4,30	7,32	6,73	4,62	4,38	3,87	5,20
Tabanan	10,05	12,14	12,16	13,66	11,32	9,67	11,50
Badung	69,59	62,14	51,87	60,44	63,46	56,59	60,68
Gianyar	19,81	17,79	11,90	15,68	17,99	15,48	16,44
Bangli	4,87	4,01	4,95	4,03	3,91	3,38	4,19
Klungkung	8,51	7,21	7,57	6,49	8,14	6,60	7,42
Karangasem	10,47	10,79	8,68	7,77	9,35	7,35	9,07
Denpasar	43,21	28,54	24,88	25,98	31,59	25,33	29,92
Rata-rata	19,67	17,38	14,85	15,95	17,40	14,81	16,68

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Dari Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Bali dari tahun 2001 - 2006 secara rata-rata mengalami penurunan, meskipun secara statistik tidak signifikan pada taraf 5 persen. Penurunan tersebut karena semakin banyaknya dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota selama kurun waktu tersebut, dan juga lambatnya pertumbuhan penerimaan PAD dibandingkan dengan kemampuan potensial masyarakat, seperti yang akan dibahas dalam sub bahasan Upaya Pemungutan PAD.

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan alokasi dananya pada belanja baik belanja aparatur maupun

belanja pelayanan publik. Sebaiknya, semakin besar persentase dana yang dialokasikan untuk belanja publik adalah semakin baik. Sebab jika semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur berarti persentase dana pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Patokan yang pasti atas besarnya belanja aparatur dan belanja pelayanan publik yang ideal belum ada karena sangat dipengaruhi oleh dominasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang ditargetkan. Peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dengan demikian, meskipun alokasi belanja aparatur pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja publik, namun diharapkan persentase alokasi publik dibandingkan dengan persentase alokasi belanja aparatur terus mengalami peningkatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan.

Rasio keserasian alokasi dana dapat dihitung dengan menggunakan formula yang dikutip dari Abdul Halim (2002):

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Rasio keserasian alokasi dana Pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi Bali, Tahun Anggaran 2001 -2006 (%)

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata
Buleleng	18,27	17,48	18,00	21,74	18,57	43,99	23,01
Jembrana	10,61	11,68	25,82	35,12	34,19	44,38	26,97
Tabanan	23,69	30,56	30,44	33,30	37,69	40,77	32,74
Badung	47,66	48,50	50,01	55,27	53,53	51,52	51,08
Gianyar	37,46	39,65	40,00	47,37	47,08	54,74	44,38
Bangli	18,33	23,69	30,66	37,29	38,99	45,10	32,34
Klungkung	32,60	37,90	39,00	50,01	45,00	50,42	42,49
Karangasem	24,86	29,41	33,61	46,30	44,55	53,70	38,74
Denpasar	30,93	32,15	39,10	37,00	38,13	39,91	36,20
Rata-rata	27,16	30,11	34,07	40,38	39,75	47,17	36,44

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata alokasi dana untuk belanja publik atau pembangunan pada kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 – 2006 adalah 36,44 persen. Persentase rata-rata alokasi dana untuk belanja publik yang paling kecil dimiliki Kabupaten Buleleng, tertinggi Kabupaten Badung. Dengan berjalannya waktu, dana untuk belanja publik pada kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 – 2006 secara rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 27,16 persen pada tahun 2001, menjadi 47,17 persen pada tahun 2006. Peningkatan tersebut tidak lepas dari semakin besarnya dana perimbangan, khususnya berupa Dana Alokasi Khusus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membiaya belanja yang sifatnya spesifik. Pada awal dilaksanakan otonomi daerah, yaitu pada tahun 2001, hanya beberapa daerah

yang memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus, namun pada beberapa tahun terakhir semua daerah memperoleh dana tersebut, termasuk Kabupaten Badung yang mempunyai PAD yang cukup besar.

Keberhasilan suatu daerah menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai pemerintahannya yang diperoleh dari daerah sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 jenis PAD adalah: 1) pendapatan asli daerah; 2) dana Perimbangan; 3) pinjaman Daerah; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Potensi PAD pada masing-masing daerah tergantung dari kemampuan, usaha, integritas, dan kejujuran aparat dalam memungut dan mengelola PAD. Di samping itu, potensi PAD juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk membayar (*ability to pay*) yang umumnya dicerminkan oleh pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu usaha pemungutan PAD umumnya diukur berdasarkan rasio antara PAD per kapita dengan PDRB per kapita. Secara logika, pendapatan masyarakat yang tinggi, wajar juga dikenakan pajak atau pungutan yang tinggi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Upaya pemungutan PAD dapat dirumuskan:

$$\text{Upaya PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Per Kapita}}{\text{PDRB Per Kapita}} \times 100\%$$

Upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi Bali pada tahun 2001 - 2006 disajikan pada Tabel 3. Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 – 2006 adalah 1,70 persen. Kabupaten yang mempunyai upaya pemungutan PAD paling rendah adalah Kabupaten Buleleng, sedangkan yang paling tinggi adalah Kabupaten Badung. Dengan berjalannya waktu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi Bali secara rata-rata mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan pada taraf nyata 5 persen. Rata-rata upaya pemungutan PAD 2,14 persen pada tahun 2001 menjadi 1,52 persen pada tahun 2006. Hal ini seyogyanya tidak terjadi, sebab secara sederhana, tanpa melakukan ekstensifikasi, kabupaten/kota dapat secara sederhana meningkatkan PAD dengan melakukan penyesuaian tarif objek PAD secara periodik sesuai dengan perkembangan inflasi atau sesuai dengan pertumbuhan PDRB sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002).

Hasil analisis faktor mengindikasikan bahwa variabel rasio keserasian, rasio kemandirian, serta upaya pemungutan PAD ternyata valid atau memenuhi kriteria statistik dalam membentuk model pengukuran kinerja keuangan daerah kabupaten/ kota di Propinsi Bali untuk tahun 2001 – 2006. Dari informasi tersebut, selanjutnya dihasilkan indeks komposit yang disebut Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKD). Selanjutnya, dihitung standar deviasi dan ketimpangannya melalui koefisien variasi seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Upaya pemungutan PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, Tahun Anggaran 2001 – 2006 (%)

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata
Buleleng	0,61	0,56	0,59	0,55	0,56	0,58	0,58
Jembrana	0,44	0,81	0,70	0,56	0,49	0,57	0,59
Tabanan	1,29	1,73	1,64	1,87	1,52	1,43	1,58
Badung	8,70	6,45	4,22	5,64	5,55	4,70	5,88
Gianyar	2,11	2,01	1,27	1,54	1,46	1,61	1,67
Bangli	0,61	0,63	0,77	0,65	0,58	0,65	0,65
Klungkung	1,08	1,08	1,07	0,93	1,10	1,16	1,07
Karangsem	1,38	1,35	1,13	1,04	1,08	1,19	1,20
Denpasar	3,09	2,19	1,88	1,69	1,85	1,80	2,08
Rata-rata	2,14	1,87	1,47	1,61	1,58	1,52	1,70

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Tabel 4. Indeks kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2001 - 2006

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata	Peringkat
Buleleng	1,29	1,26	1,25	1,34	1,29	1,94	1,40	9
Jembrana	1,00	1,19	1,53	1,69	1,64	1,92	1,50	8
Tabanan	1,70	2,03	2,01	2,18	2,15	2,17	2,04	5
Badung	5,51	4,85	4,10	4,79	4,79	4,37	4,74	1
Gianyar	2,49	2,48	2,17	2,52	2,54	2,73	2,49	3
Bangli	1,26	1,39	1,63	1,76	1,78	1,95	1,63	7
Klungkung	1,84	1,95	1,99	1,79	2,17	2,29	2,01	6
Karangsem	1,76	1,88	1,89	2,18	2,18	2,41	2,05	4
Denpasar	3,11	2,57	2,60	2,52	2,72	2,61	2,69	2
Rata-rata	2,22	2,18	2,13	2,31	2,36	2,49	2,28	
Standar deviasi	1,40	1,12	0,84	1,01	1,01	0,76		
Ketimpangan (%)	62,95	51,30	39,21	43,79	42,80	30,73		

Berdasarkan Tabel 4, kinerja keuangan daerah yang paling baik dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2001, yaitu dengan indeks 5,51, sedangkan yang paling jelek oleh Kabupaten Jembrana, juga pada tahun 2001, dengan indeks 1. Secara rata-rata selama tahun 2001 – 2006, daerah yang memiliki kinerja keuangan paling baik adalah Kabupaten Badung, kemudian disusul oleh Kota Denpasar, sedangkan yang paling jelek adalah Kabupaten Buleleng dan di atasnya adalah Kabupaten Jembrana.

Secara rata-rata indeks kinerja keuangan daerah untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan hasil analisis trend dengan tingkat signifikansi kurang dari lima persen.

Kinerja keuangan yang semakin baik seperti ini sesuai dengan perkembangan waktu merupakan harapan semua pihak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena kinerja keuangan yang baik merupakan akuntabilitas atau pertanggung-jawaban pemerintah daerah dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu ciri dari terapan pengelolaan pemerintah yang baik seperti yang dikemukakan oleh Halim (2002).

Adanya peningkatan kinerja keuangan daerah sesuai dengan perkembangan waktu sesuai dengan pendapat Wagner (Guritno, 2001) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat dengan berkembangnya perekonomian. Dengan semakin berkembangnya perekonomian terutama

yang disebabkan karena industrialisasi menyebabkan hubungan antar masyarakat semakin rumit. Hal ini membutuhkan penanganan yang semakin kompleks, sehingga pengeluaran pemerintah berkembang. Oleh karena itu dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan penduduk, peningkatan pendapatan, perkembangan pendidikan masyarakat dan perkembangan dinamika sosial, maka peningkatan kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu keharusan.

Ketimpangan kinerja keuangan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan keadaan yang menurun. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil analisis trend dengan tingkat signifikansi yang kurang dari 5 persen.

Penurunan ketimpangan kinerja keuangan tersebut tidak lepas dari keseriusan dari pemerintah pusat dalam memperbesar dana perimbangan yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki kapasitas keuangan yang kecil, yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah dalam mengelola keuangan, antara lain dengan meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi anggaran untuk belanja publik.

Ketimpangan Kinerja Pembangunan

Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini digunakan indikator: 1) PDRB perkapita, 2) rata-rata lama pendidikan, dan 3) usia harapan hidup. Berdasarkan indeks kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan melalui analisis faktor, selanjutnya dihitung ketimpangannya dengan menggunakan koefisien variasi, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-ratanya dikalikan 100 persen.

Tingkat pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau negara, terutama untuk pembangunan ekonomi, baik dari segi nominal atau pertumbuhannya.

Tabel 5. PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Propinsi Bali (Tahun 2001-2006) menurut harga konstan Tahun 2000 (Rp 1.000)

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-Rata	Per-tumbuhan (%)
Buleleng	3.830	3.944	3.858	4.048	4.273	4.412	4.061	3,04
Jembrana	5.015	5.104	4.966	5.189	5.430	5.560	5.211	2,17
Tabanan	4.119	4.250	4.234	4.413	4.655	4.810	4.414	3,36
Badung	10.409	10.601	7.098	9.909	10.249	10.254	9.753	-0,30
Gianyar	5.447	5.546	5.506	5.704	5.939	6.121	5.711	2,47
Bangli	3.848	3.911	3.820	3.947	4.096	4.182	3.968	1,73
Klungkung	5.412	5.650	5.587	5.847	6.163	6.388	5.473	3,61
Karangsem	3.360	3.423	3.295	3.436	3.606	3.691	3.468	1,97
Denpasar	6.254	6.420	7.392	7.594	7.819	8.294	7.296	6,52
Rata-rata	5.299	5.428	5.084	5.565	5.803	5.968	5.525	2,52

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5, selama tahun 2001 – 2006 rata-rata pendapatan per kapita pada kabupaten/kota di

Propinsi Bali menurut harga konstan tahun 2000 rata-rata Rp 5.525.000. Selama periode tersebut rata-rata PDRB per kapita paling tinggi adalah di Kabupaten Badung, yaitu sebesar Rp 9.753.000,-, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Karangasem, yaitu Rp 3.468.000,-.

Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, tingkat PDRB per kapita di kabupaten/kota di Propinsi Bali secara rata-rata mengalami pertumbuhan 2,52 persen per tahun. Namun secara statistik PDRB per kapita di kabupaten/kota di Propinsi Bali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Daerah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Kota Denpasar, yaitu 6,52 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Klungkung sebesar 3,61 persen, sedangkan yang paling rendah pertumbuhannya adalah Kabupaten Badung, yaitu dengan pertumbuhan yang negatif sebesar 0,30 persen selama periode tersebut. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung disebabkan oleh menurunnya kinerja industri pariwisata yang merupakan andalan daerah ini karena kunjungan wisatawan ke Bali pada umumnya dan ke Kabupaten Badung pada khususnya.

Kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama pendidikan masyarakat pada masing-masing di kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 - 2006. Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat di kabupaten/kota di Propinsi Bali selama tahun 2001 – 2006 adalah selama 7,06 tahun. Lama pendidikan masyarakat yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, yaitu dengan rata-rata 10,03 tahun. Hal ini terjadi karena Denpasar merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan di Propinsi Bali yang banyak dihuni oleh penduduk yang berpendidikan tinggi. Kabupaten Karangasem dengan lama pendidikan masyarakat paling rendah, dengan rata-rata 4,65 tahun atau dengan rata-rata kurang dari tamat sekolah dasar (SD). Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh tingkat pendapatan per kapita yang rendah, yang dapat berimplikasi terhadap rendahnya akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan.

Tabel 6 Rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, Tahun 2001 – 2006 (tahun)

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-Rata	Pertumbuhan (%)
Buleleng	6,20	6,22	6,22	6,20	6,20	6,30	6,22	0,32
Jembrana	6,10	6,92	6,92	7,10	7,10	7,30	6,91	3,93
Tabanan	7,10	7,27	7,27	7,30	7,30	7,40	7,27	0,85
Badung	8,10	8,60	8,60	8,60	8,60	8,80	8,55	1,73
Gianyar	6,90	7,35	7,35	7,50	7,50	7,60	7,37	2,03
Bangli	5,50	6,08	6,08	6,20	6,20	6,30	6,06	2,91
Klungkung	6,10	6,14	6,14	6,80	6,80	7,00	6,50	2,95
Karangasem	4,10	4,65	4,65	4,80	4,80	4,90	4,65	3,90
Denpasar	9,70	10,34	10,34	9,90	9,90	10,00	10,03	0,62
Rata-rata	6,64	7,06	7,06	7,16	7,16	7,29	7,06	1,94

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Dari Tabel 6 juga diketahui pertumbuhan lama pendidikan masyarakat paling pesat terjadi di

Kabupaten Jembrana, karena daerah ini banyak diterapkan kebijakan bebas uang sekolah, seperti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya. Sedangkan daerah yang pertumbuhan lama pendidikan masyarakatnya paling lambat adalah Kabupaten Buleleng. Dengan bertambahnya waktu, rata-rata lama pendidikan masyarakat di Propinsi Bali dari tahun 2001 – 2006 mengalami peningkatan yang signifikan.

Usia harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. Dari Tabel 7 diketahui usia harapan hidup penduduk kabupaten/kota di Propinsi Bali pada tahun 2006 secara rata-rata mencapai 71,01 tahun. Angka ini lebih tinggi 1,71 tahun dibandingkan dengan pada tahun 2001.

Secara statistik rata-rata usia harapan hidup penduduk kabupaten/kota di Propinsi Bali dari tahun 2001 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan secara signifikan, sebagai akibat dari peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Tabel 7 juga mengindikasikan bahwa usia harapan hidup pada tahun 2006 yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Tabanan, yaitu 74,30 tahun, sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu 67,80 tahun.

Tabel 7. Usia harapan hidup penduduk pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, Tahun 2001 – 2006 (tahun)

No	Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-Rata	Pertumbuhan (%)
1	Buleleng	66,00	66,18	67,29	67,50	68,20	68,40	67,26	0,73
2	Jembrana	69,80	70,25	71,33	70,80	71,40	71,70	70,88	0,54
3	Tabanan	70,60	72,17	73,21	73,70	74,20	74,30	73,03	1,05
4	Badung	70,50	71,06	72,24	71,20	71,40	71,60	71,33	0,31
5	Gianyar	70,70	71,62	72,65	71,50	71,80	72,00	71,71	0,37
6	Bangli	70,50	70,78	71,14	71,10	71,30	71,40	71,04	0,26
7	Klungkung	67,10	67,78	68,93	68,30	68,80	69,10	68,34	0,60
8	Karangasem	66,40	66,69	67,88	67,00	67,60	67,80	67,23	0,42
9	Denpasar	71,60	71,81	72,33	72,70	72,70	72,80	72,32	0,34
	Rata-rata	69,24	69,82	70,78	70,42	70,82	71,01	70,35	0,51

Sumber: BPS Propinsi Bali, 2007 (diolah)

Berdasarkan hasil olahan data dapat diketahui bahwa PDRB perkapita, pendidikan, dan usia harapan hidup secara statistik valid atau memenuhi kriteria sebagai variabel pengukur kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Propinsi Bali untuk tahun 2001 – 2006. Selanjutnya, berdasarkan *score factor* dari analisis faktor ditransformasi menjadi minimal satu yang menghasilkan indeks kesejahteraan masyarakat yang mana indeks kompositnya ditampilkan pada Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8, tahun 2001 kesejahteraan masyarakat tertinggi dimiliki Kabupaten Badung, dengan indeks 4,11, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem dengan indeks sama dengan 1. Pada tahun 2006 kesejahteraan masyarakat yang tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, dengan indeks 4,61, sedangkan yang terendah tetap dimiliki oleh

Tabel 8. Indeks kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2001 - 2006

Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata	Peringkat
Buleleng	1,63	1,68	1,85	1,91	2,07	2,13	1,88	8
Jembrana	2,43	2,76	2,91	2,92	3,06	3,22	2,88	5
Tabanan	3,01	3,03	3,19	3,30	3,43	3,51	3,25	4
Badung	4,11	4,38	3,93	4,28	4,37	4,83	4,32	2
Gianyar	2,89	3,20	3,36	3,24	3,33	3,57	3,27	3
Bangli	2,16	2,39	2,43	2,48	2,54	2,62	2,44	7
Klungkung	2,07	2,22	2,40	2,55	2,68	2,79	2,45	6
Karangasem	1,00	1,23	1,40	1,32	1,44	1,53	1,32	9
Denpasar	4,00	4,24	4,50	4,48	4,52	4,61	4,39	1
Rata-rata	2,59	2,79	2,89	2,94	3,05	3,20	2,91	
Standar deviasi	1,03	1,06	0,98	1,03	1,00	1,08		
Ketimpangan (%)	39,80	38,00	34,08	34,90	32,95	33,71		

Sumber : Hasil penelitian

Kabupaten Karangasem dengan indeks sama dengan 1,39. Dengan melihat rata-rata indeks kesejahteraan masyarakat selama tahun 2001 – 2006, maka dapat diketahui daerah yang memiliki kesejahteraan masyarakat paling baik adalah Kota Denpasar, kemudian disusul oleh Kabupaten Badung, sedangkan yang paling jelek adalah Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian konsisten dengan publikasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Bali tahun 2006 tentang "Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2005", yang menempatkan Kota Denpasar dengan peringkat IPM tertinggi dan IPM terendah Kabupaten Karangasem, meskipun indikator yang digunakan sedikit berbeda. BPS menggunakan indikator yang mengacu pada konsep UNDP, yaitu menggunakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Secara rata-rata, indeks kesejahteraan masyarakat untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan waktu dari tahun 2001 – 2006 mengalami peningkatan yang sangat signifikan (tingkat signifikansi kurang dari 1 persen), yaitu dari 2,59 pada tahun 2001 menjadi 3,20 pada tahun 2006.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 ke tahun 2006 menunjukkan keadaan yang menurun. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil analisis trend dengan tingkat signifikansi yang kurang dari 5 persen.

Dampak Ketimpangan Kinerja Keuangan terhadap Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa dengan dilaksanakan desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung meningkat atau semakin baik selama tahun 2001 – 2006. Di lain pihak ketimpangan kinerja keuangan daerah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode yang sama mengalami penurunan atau dalam kondisi yang lebih baik. Hasil analisis data menggunakan model regresi sederhana, ternyata ketimpangan kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2006 berpengaruh positif dan

signifikan (tingkat signifikansi kurang dari 5 persen) terhadap ketimpangan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan oleh tingkat, seperti yang ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil analisis regresi dampak ketimpangan kinerja keuangan terhadap ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Bali (2001-2006)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	B		
1 (Constant)	25.658			9.922	.001
Ketimpangan Kinerja Keuangan	.220	.891		3.928	.017

a. Dependent Variable: Ketimpangan Kinerja Pembangunan

Keadaan tersebut berarti bahwa semakin menurun ketimpangan kinerja keuangan daerah, menyebabkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2006 juga semakin berkurang. Dari hasil analisis diperoleh bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,794 yang berarti bahwa variasi dari kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2006, 79,4 persen dijelaskan oleh variasi kinerja keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 20,6 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Adanya pengaruh yang positif dan signifikan ketimpangan kinerja keuangan daerah terhadap ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2006, membantah pendapat Huther dan Shah (1998) yang mengamati bahwa desentralisasi fiskal memperlebar antara daerah yang kaya dan yang miskin, dan Lindaman dan Thurmaier (2002) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Pengaruh positif ketimpangan kinerja keuangan daerah terhadap ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah juga sesuai dengan pendapat Todaro (2000), bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer", dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya. Pemberian DAU dan DAK yang lebih besar kepada daerah yang mempunyai kapasitas keuangan yang rendah merupakan salah satu usaha pemerintah pusat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Senada dengan Todaro, Minassian (Blanchard dan Shleifer, 2000) peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui keputusan-keputusan publik pemerintah yang diimplementasikan dalam peran alokasi dan distribusi atas sumber-sumber ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dari bagian-bagian sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2001-2006, kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Di pihak lain, ketimpangan kinerja keuangan daerah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang menurun atau semakin berkurang. Penurunan ketimpangan kinerja keuangan tersebut tidak lepas dari uluran tangan pemerintah pusat dalam memperbesar dana perimbangan yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki kapasitas keuangan yang kecil, yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta meningkatnya keahlian dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah dalam mengelola keuangan, sehingga PAD dan selalu meningkat, dan proporsi belanja publik terus membesar.

Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa ketimpangan kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001 – 2006. Hal ini berarti bahwa semakin berkurang ketimpangan kinerja keuangan daerah, maka semakin berkurang ketimpangan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001–2006. Hasil penelitian ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal atau otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Halim (2001), Simanjuntak (2000), Suwandi (2000), Minassian (1997), dan Todaro (2000) yang pada intinya mengatakan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan bahasan dan kesimpulan disarankan agar pemerintah daerah selalu meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan PAD minimal sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan PDRB, memperbesar alokasi anggaran untuk belanja publik atau pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah pusat juga diharapkan selalu memperhatikan daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang kecil untuk mengurangi ketimpangan kinerja keuangan, yang dapat berimplikasi terhadap ketimpangan kesejahteraan masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O., dan A. Shleifer. 2000. Fiskal Federalism with and without Political Centralization: China Versus Russia. NBER Working Paper 7616.
- BPS Provinsi Bali. 2006. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2005. Denpasar
- Guritno Mangkoesebroto. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hair, J.F. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Fourth Edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- . 2002. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Huther, Jeff dan Anwar Shah. 1998. *Applying a Simple Measure of Good Governance to Debate on Fiscal Decentralization*. World Bank Working Paper.
- Khusaini, Mohamad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Lindaman, Kara dan Kurt Thurmaier. 2002. Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Need and Fiscal Decentralization. *Journal of Public Economics*, The University of Chicago, USA.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nata Wirawan, I Gusti Putu. 2001. *Statistik Deskriptif*. Keraras Mas, Denpasar
- Oroso, Nehemiah E. 2003. *Institution, Decentralization and Growth*. Economic Commission of Africa.
- Peterson, George E. 1996. *Decentralization in Latin America: Learning through Experience*. World Bank, Washington DC.
- Simanjuntak, Robert. 2000. *Decentralization and Local Autonomy*. Makalah Work Shop Otonomi Daerah, Kerjasama LPEM-UI dan IRIS Jakarta.
- Suwandi, Made. 2000. *Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah (Sebagai tindak lanjut UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999)*, Makalah Work Shop Otonomi Daerah, Kerjasama LPEM-UI dan IRIS Jakarta.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Pengantar Ekonometrika*. Buku Ajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Buku 1 Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.